

JURNAL HI

Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta

Febrina Rahmatia N.P

[KEGAGALAN KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM 2014 DI SKOTLANDIA]

Sebuah penelitian mengenai alasan kegagalan kelompok Pro-Kemerdekaan dalam referendum yang dilaksanakan di Skotlandia pada tahun 2014

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

Naskah publikasi dengan judul

KEGAGALAN KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM 2014 DI SKOTLANDIA

Febrina Rahmatia N.P

(20130510070)

Yang Disetujui

Ali Muhammad, M.A., Ph.D,

Dosen Pembimbing

KEGAGALAN KELOMPOK PRO-KEMERDEKAAN DALAM REFERENDUM 2014 DI SKOTLANDIA

(Failures of Pro-Independence's Movement in Referendum at 2014 in Scotland)

Febrina Rahmatia N.P

Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Ringroad Barat, Kasihan, Bantul, DIY, Indonesia 55183

febrinarahmatianp@gmail.com

ABSTRACT

A referendum that was held on September 18th 2014 in Scotland, is a form of demands by some people who want to Scotland be independent country. Referendum won by group of Pro-The Great of Britanian had defeated of Pro-Scotland's independent deputed by Alex Salmond as Chairman of Scotland National Party and Scotland's First Minister. Failure of Pro-Independent is driven by some factors. Is because of some people have not sure with independence of Scotland and still wants to join with The Great of Britanian. In addition, the bid devolution broader in terms of taxes and control health, is also urge largest citizens to be more Pro-Great of Britanian.

As a large of country unified, Britanian use a special approach in pulling the interest of Scotand's peoples to keep join with The United Kingdom. This approach by relying on lack of readiness Scotland to face independece. For example, there is no certainly in determination of currency to be used. And give bid to peoples of Scotlands that if join Britanian may get greater advantage. Including of high income tax.

Keywords: *Referendum 2014 Scotland, devolution, Alex Salmond, UK, Great of Britanian*

Pendahuluan

Skripsi ini mengulas tentang bagaimana kelompok Pro-Kemerdekaan yang dipimpin oleh Alex Salmond sebagai perdana menteri Skotlandia, kalah dalam referendum Skotlandia 2014. Dimulai dari Skotlandia yang dulunya merupakan kerajaan yang merdeka hingga adanya penyatuan kerajaan Jauh sebelum abad ke-15, Skotlandia sudah sering berperang melawan Kerajaan Inggris dan beberapa kali Kastil Edinburgh dikuasai Inggris serta kembali direbut.

Namun pada tahun 1603 Ratu Inggris Elizabeth I wafat dan tidak punya ahli waris tahta dan keluarga terdekat adalah Raja James VI Skotlandia, seperti dijelaskan DR Ewen Cameron dari Departemen Sejarah Skotlandia, Universitas Edinburgh. Raja James VI Skotlandia kemudian merangkap sebagai James I untuk Skotlandia dan Inggris, yang dilihat sebagai tonggak dari penyatuan kedua kerajaan.

Puncak penyatuan adalah pada tahun 1707, ketika parlemen Skotlandia dan Inggris resmi membubarkan diri untuk bersatu walau sebenarnya lebih merupakan parlemen Inggris karena perwakilan Skotlandia amat sedikit. Hingga terjadi tuntutan dari sebagian besar warga Skotlandia dalam bentuk referendum. Tuntutan akan adanya hak istimewa tersampaikan pada referendum 1979 dan

1997 hingga terbentuk Parlemen Skotlandia yang memiliki beberapa wewenang istimewa dalam mengatur urusan dalam negerinya saja. Hingga akhirnya semakin besar devolusi yang diharapkan oleh warga hingga tercetus keinginan untuk merdeka. Harapan tersebut dibantu oleh kemenangan Partai Nasional Skotlandia yang menang dalam pemilu dan mencetuskan untuk mengadakan referendum kemerdekaan Skotlandia dari Inggris.

Upaya Skotlandia untuk melepaskan diri dari Britania Raya di dasarkan pada gagasan bahwa Skotlandia, dengan hidup budayanya sendiri, sistem perbankan, hukum dan pendidikan yang terpisah dari orang-orang Inggris, akhirnya harus memisahkan diri dari Inggris dan berdiri sebagai negara berdaulat seperti sebelum penyatuan dengan Britania Raya.

Keinginan untuk merdeka ini diprakarsai oleh kelompok pembela kemerdekaan yang sering disebut kelompok "YES SCOTLAND". Dimana kelompok ini mendukung penuh dengan adanya suara YES yang berarti setuju dengan kemerdekaan Skotlandia dari kerajaan Inggris. Kelompok ini dipimpin oleh Menteri pertama Skotlandia yakni Alex Salmond dan wakilnya Nicola Sturgeon.

Alasan timbulnya keinginan sebagian warga Skotlandia memilih untuk berpisah dari Inggris yaitu: *Pertama*, adanya keinginan menyingkirkan Partai Konservatif. Bagi

Skotlandia, referendum bukan sekadar tentang kemerdekaan, tapi memastikan kelompok Konservatif tidak pernah lagi memerintah Skotlandia. Pemilih Skotlandia secara tradisional cenderung ke kiri, dan Partai Buruh selalu paling populer.

Partai Konservatif Kanan-Tengah tidak memiliki banyak pendukung. Dari 59 kursi yang diperebutkan pada Pemilu 2010, misalnya, Partai Buruh meraih 41. Konservatif Kanan-Tengah meraih satu. Sisanya direbut Partai Demokrat dan Partai Nasional Skotlandia. Berbeda dengan Skotlandia, orang Inggris akan selalu memilih Partai Konservatif. Jadi, kendati Skotlandia selalu memilih Partai Buruh, mereka sering menemukan diri berada di bawah pemerintahan Partai Konservatif.

Jika merdeka, orang Skotlandia akan selalu berada di bawah pemerintahan yang mereka pilih. Sejak krisis keuangan 2008, Inggris mengadopsi serangkaian kebijakan penghentian yang kejam, termasuk pemotongan biaya sektor publik dan memangkas tunjangan kesejahteraan.

Berikutnya yang *kedua*, otonomi sebagai simbol kebanggaan nasional. Catatan *The Economist* menyebutkan, referendum tidak akan mengubah kalkulasi pajak dan pendapatan minyak, tapi mengubah identitas dan kekuasaan.

Pada Tahun 1999, Skotlandia menciptakan parlemen pertama. Britania Raya memberikan hak otonomi di bidang

pendidikan dan kesehatan. Ternyata, pemberian otonomi itu memicu kelompok nasionalis menuntut hak otonomi lebih luas. Kini, orang Skotlandia dihadapkan pada pilihan merdeka atau tetap bersama Inggris. Jika referendum ini tidak dimanfaatkan untuk merdeka, orang Skotlandia mungkin tidak punya kesempatan lagi sampai beberapa generasi ke depan.

Ketiga, mereka yakin kemerdekaan akan meningkatkan perekonomian. Kubu pendukung kemerdekaan berpendapat Skotlandia yang merdeka akan lebih mampu mengelola perekonomian, terutama penghasilan dari pajak dan cadangan minyak di lepas pantai Skotlandia.

Keempat, partai Nasional Skotlandia (SNP) menguasai Parlemen Skotlandia. Alex Salmond sebagai Pemimpin partai sekaligus menjabat sebagai Kepala Menteri Skotlandia saat itu melaksanakan kampanye 'yes', yang merupakan gerakan pro-kemerdekaan Skotlandia dari perserikatan Inggris.

Keberhasilan Partai Nasional Skotlandia dalam meraih mayoritas suara lewat pemilihan umum 2011, dengan perolehan 69 dari total 129 kursi membuat keyakinan besar untuk melangkah lebih maju dalam menghantarkan kemerdekaan bagi Skotlandia kelak.

Usaha yang mereka lakukan sangatlah besar dari kampanye kesetiap daerah yang ada di Skotlandia, mereka juga

berkampanye di berbagai media yakni dari media cetak hingga media sosial. Selain itu, mereka juga mengeluarkan buku panduan dengan judul *Scotland's Future* yang berisikan gambaran Skotlandia apabila menjadi negara yang merdeka.

Akantetapi hasil referendum Skotlandia 2014 lalu menyatakan bahwa, 55% warga memilih "NO" dan 45% warga memilih "YES" yang artinya lebih banyak warga yang tidak setuju dengan pisahnya Skotlandia dari kerajaan Inggris. Hal ini dipicu dengan adanya tawaran devolusi lebih oleh 3 politisi besar Inggris dan karena masih ada ketakutan yang cukup besar dari sebagian besar warga Skotlandia yang meragukan kemampuan dan kesiapan Skotlandia sebagai negara merdeka dan mandiri dari Inggris karena sudah lebih dari 307 tahun bergabung dengan Inggris.

Studi Pustaka

Untuk menjawab pertanyaan alasan kegagalan kelompok pro-kemerdekaan kalah dalam referendum 2014, maka saya akan menggunakan teori Integrasi Nasional. Maka teori yang digunakan penulis dalam menganalisa permasalahan diatas dengan menggunakan teori integrasi nasional oleh Myron Weiner (1971).

Ia menyatakan bahwa integrasi menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang

beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Dimana nasional pusat ialah pemerintah Inggris dan unit sosial yang lebih kecil ialah diatur oleh pemerintah daerah Skotlandia sendiri.

Sedangkan, keterkaitan kebijakan pemerintah pusat dalam rangka mengupayakan terwujudnya integrasi nasional yang mantap menggunakan strategi yang mungkin ditempuh, yaitu:

Strategi Pluralis. Paham pluralis merupakan paham yang menghargai terdapatnya perbedaan dalam masyarakat. Paham pluralis pada prinsipnya mewujudkan integrasi nasional dengan memberi kesempatan pada segala unsur perbedaan yang ada dalam masyarakat untuk hidup dan berkembang.

Ini berarti bahwa dengan strategi pluralis, dalam mewujudkan integrasi nasional negara memberi kesempatan kepada semua unsur keragaman dalam negara, baik suku, agama, budaya daerah, dan perbedaan-perbedaan lainnya untuk tumbuh dan berkembang, serta hidup berdampingan secara damai. Jadi, integrasi nasional diwujudkan dengan tetap menghargai terdapatnya perbedaan-perbedaan dalam masyarakat.

Hal ini sejalan dengan pandangan multikulturalisme, bahwa setiap unsur perbedaan memiliki nilai dan kedudukan yang sama. Sehingga masing-masing

berhak mendapatkan kesempatan untuk berkembang.

Pembahasan

Menurut analisa, yang dilakukan Inggris sebagai pemerintah pusat lebih cenderung menggunakan strategi pluralis dalam upaya integrasi nasionalnya. Dimana Inggris dan Skotlandia memiliki perbedaan dasar baik budaya maupun sosial yang sangat berbeda. Inggris pernah memberikan beberapa wewenang otonomi bagi Skotlandia.

Pada referendum 1997, dalam referendum tersebut Skotlandia berhasil mendirikan parlemen sendiri serta otoritas dalam mengatur pajaknya serta beberapa otonomi mandiri yang tidak dapat diganggu oleh parlemen Inggris.

Hal tersebut membuktikan bahwa Inggris tidak secara langsung mengatur negaranya agar tunduk dengan satu peraturan yang sama dengan Inggris. Begitupula dengan keputusan Inggris yang akan memberikan otonomi lebih apabila Skotlandia tetap berada dalam wilayah integritas Inggris.

Selain itu, apabila disejajarkan dengan teori yang digunakan penulis yakni mengenai pendekatan Pluralisasi dalam upaya Integrasi nasional, maka Inggris berusaha untuk mempertahankan wilayah Integrasinya yakni Skotlandia dengan pendekatan perlahan yakni penyesuaian

keinginan dari warga Skotlandia yakni kebebasan diberbagai instrumen sosial maupun kewenangan lain.

Karena negara merdeka berarti negara tersebut dapat menentukan identitasnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Maka Inggris memberikan wewenang yang lebih luas dari yang semestinya agar Skotlandia tidak berpisah dengan negara bagian Inggris.

Dengan adanya pertimbangan dari segi sosial dan lainnya, Inggris tidaklah membuat keputusan yang menekan Skotlandia. Inggris juga tidak menyamaratakan semua negara bagiannya menjadi satu identitas yang sama yakni negara Inggris. Tetapi menyesuaikan dengan sosial, budaya, dan karakter negaranya hingga bernama Negara Bagian dari Inggris atau negara bagian dari Kerajaan Inggris yang terdiri dari parlemen-parlemen dari masing-masing negara bagian.

Dilain sisi, adanya dorongan dari Inggris sebagai negara kolonialisme yang kuat memang memiliki kepentingan yang besar terhadap negara-negara koloninya. Termasuk pada Skotlandia, sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah terutama dalam hal Minyak bumi, membuat Inggris semakin berat melepaskan Skotlandia dari kesatuan Inggris.

Dengan usaha yang dilakukan beberapa tokoh politik Inggris yang disampaikan oleh David Cameron ialah tawaran dari para

pemimpin politik Inggris, baik pihak pemerintah maupun oposisi yang menjanjikan devolusi lebih besar kepada Skotlandia jika mereka menolak opsi kemerdekaan.

Ada tiga partai besar yang menjanjikan hal tersebut, yakni: Partai Konservatif, Partai Buruh, dan Partai Demokrat. Devolusi sendiri artinya ialah pelimpahan kekuasaan dari pemerintah pusat pada suatu negara berdaulat kepada pemerintahan pada tingkat subnasional, seperti tingkat regional, lokal, atau negara bagian.

Janji yang diberikan selama kampanye demi kemerdekaan Skotlandia yang berasal dari David Cameron, pemimpin partai buruh yakni Ed Miliband, dan pemimpin partai liberal demokrat yakni Nick Glegg yang menjamin anggaran bagi Skotlandia serta lebih banyak kontrol atas program kesehatan.

Mantan perdana menteri dari partai buruh yakni Gordon Brown meminta pada masyarakat Skotlandia untuk memilih tetap bersama dengan Inggris dan mengusulkan pemberian kekuasaan besar pada parlemen Skotlandia dengan meningkatkan 54% dari pendapatan pajak Skotlandia menjadi 18 Miliar poundsterling dari tahun sebelumnya yang hanya 40 Miliar poundsterling. Hal tersebut disetujui oleh partai konservatif dan akan diberikan kewenangan dalam mengatur tarif pajak dan penghasilan serta

untuk menerbitkan obligasi sendiri pada 2015.

Pada lima tahun terakhir, persentase yang lebih kecil diperkirakan pendapatan pajak Skotlandia dihabiskan untuk perlindungan sosial berupa kesejahteraan dan pensiun, dibandingkan dengan Inggris sebagai bagian dari PDB juga telah lebih rendah di Skotlandia dibandingkan di Inggris pada 5 tahun terakhir.

Sedangkan untuk kontrol kesehatan sendiri, tunjangan kesehatan telah ditiadakan pada bulan Mei 2010, dan biaya resep digratiskan sepenuhnya meskipun dokter gigi dan apoteker bisa saja mengenakan biaya jika pendapatan pasien lebih dari 30.000 poundsterling pertahun. Kebijakan dan pembiayaan kesehatan merupakan tanggungjawab direktorat kesehatan pemerintah Skotlandia.

Akantetapi, penetapan itu disepakati oleh pemerintah Skotlandia dengan pemerintah Inggris. Hal ini memunculkan ketidakadilan terhadap masyarakat Skotlandia sendiri perihal pendapatan yang berhubungan dengan bantuan sosial. Maka dengan adanya otoritas lebih dalam hal kesehatan ini dapat mengatasi masalah ketidakadilan ini.

Tawaran yang cukup menjanjikan ini memang membuat banyak masyarakat cukup tertarik. Jaminan kesehatan merupakan poin penting yang dipertimbangkan oleh semua orang yang

masih hidup. Apabila kesehatan mereka telah dijamin pemerintah maka itu adalah keuntungan yang sangat besar. Serta penemuan dan pengembangan dalam bidang kesehatan sangat menguntungkan bagi masyarakat maupun negara itu sendiri.

Disisi lain, kekhawatiran yang dirasakan oleh beberapa warga Skotlandia yang cemas akan beberapa hal yakni: *pertama*, banyaknya warga Skotlandia yang memilih tetap dengan Inggris karena kekhawatiran bahwa memisahkan diri dari Inggris maka menyebabkan terlemparnya mereka dari blok Uni Eropa.

Kedua, rencana ekonomi pemerintah Skotlandia yang belum matang. Rencana ekonomi Skotlandia yang sangat bergantung pada sektor minyak dan gas dari North Sea sebagai pendapatan negara terbesar dirasa bukan merupakan pilihan yang tepat. Karena mengandalkan pendapatan dari sumber alam itu saja akan hanya dapat bertahan beberapa puluh tahun kedepan sebab cadangan alam yang semakin hari semakin menyusut.

Alex Salmond selalu menekankan bahwa pendapatan minyak dan gas yang dimiliki Skotlandia dapat menghantarkan Skotlandia menjadi negara terkaya di dunia. Menurut Salmond, apabila Skotlandia menguasai miliar barel minyak di Laut Utara maka negara tersebut akan sanggup mengurus dan mengatur pendidikan, kesejahteraan, dan fasilitas kesehatan tanpa

harus khawatir tentang apa yang dikatakan pemerintah Inggris. Namun penentangannya mengatakan, bahwa Salmond tidaklah mempertimbangkan dan meremehkan pengeluaran pemerintah yang semakin besar apalagi ketika merdeka. pada 2014, pendapatan rata-rata warga Skotlandia 1.400 poundsterling lebih banyak dari warga Inggris. Maka pemerintah Inggris menyatakan bahwa Skotlandia akan kewalahan dalam membayar segala pengeluaran tanpa subsidi dari Inggris.

Ketiga, mata uang yang belum pasti. Skotlandia memang masih menggunakan mata uang poundsterling setelah merdeka, seperti halnya bebas menggunakan mata uang euro. Namun politisi Inggris telah mengingatkan bahwasanya mereka tidak akan membiarkan Skotlandia menggunakan mata uang yang sama dengan Inggris setelah merdeka. lebih dari itu, dalam rencana Skotlandia merdeka belum ada rencana mengenai bank sentral yang akan melaksanakan kebijakan moneter di wilayah itu.

Ronald MacDonald adalah seorang profesor politik ekonomi dari Adam Smith Business School menyatakan bahwa apabila Skotlandia merdeka, negara tersebut hanya bisa menggunakan mata uangnya sendiri. Karena Inggris tidak akan membiarkan Skotlandia menggunakan mata uang yang sama dengannya apabila Skotlandia tidak ingin berbagi beban hutang dengannya.

Poundsterling memang tidak dapat digunakan oleh Skotlandia karena apabila Skotlandia merdeka struktur ekonomi yang digunakan akan berbeda dengan yang ada sekarang. Skotlandia yang akan memanfaatkan minyak bumi dan gas sebagai pemasukkan apabila menggunakan poundsterling maka akan berdampak bagi persaingan. Apalagi saat harga minyak tidak bagus maka akan berdampak pada sektor manufaktur non minyak.

Akantetapi, apabila menggunakan euro, maka Skotlandia akan menjadi satu-satunya negara penghasil minyak diantara kawasan pengguna euro lainnya, selain itu apabila menggunakan euro, Skotlandia harus punya mata uang lainnya.

Sedangkan dari segi bisnis dan investasi, beberapa pengusaha di Edinburgh dan Glasgow, termasuk pemilik restoran dan peritel prihatin dengan isu mata uang ini. Mereka khawatir bahwa bila nilai mata uang Skotlandia lebih rendah dibandingkan nilai poundsterling Inggris, maka aset mereka akan menyusut. Sementara kewajiban meningkat.

Kesimpulan

Kegagalan yang dialami oleh kelompok pro-kemerdekaan ialah disebabkan oleh ketidaksiapan Skotlandia dalam menghadapi kemerdekaan. *Pertama*, adanya tawaran otonomi yang lebih luas yakni devolusi.

Skotlandia akan mendapatkan keuntungan tanpa harus mengambil resiko untuk merdeka. Karena belum tentu negara tersebut siap menghadapi dampak-dampak pasca merdeka. Tidak selamanya kemerdekaan membawa kemakmuran bagi suatu negara. Sebab kemerdekaan berarti membangun negara dari nol.

Kedua, banyak warga Skotlandia yang masih belum yakin terhadap kesiapan Skotlandia apabila merdeka. Dapat dilihat pada ketidakpastian penggunaan mata uang pasca merdeka. Apabila disejajarkan dengan teori yang digunakan penulis yakni mengenai pendekatan Pluralisasi dalam upaya Integrasi nasional, maka Inggris berusaha untuk mempertahankan wilayah Integrasinya.

Pemerintah Inggris yakni Skotlandia dengan pendekatan perlahan yakni penyesuaian keinginan dari warga Skotlandia yakni kebebasan dibebepada instrumen sosial maupun kewenangan lain. Karena negara merdeka berarti negara tersebut dapat menentukan identitasnya sendiri tanpa campur tangan negara lain. Maka Inggris memberikan wewenang yang lebih luas dari yang semestinya agar Skotlandia tidak berpisah dengan negara bagian Inggris.

Dengan adanya pertimbangan dari segi sosial dan lainnya, Inggris tidaklah membuat keputusan yang menekan Skotlandia. Inggris juga tidak menyama-

ratakan semua negara bagiannya menjadi satu identitas yang sama yakni negara Inggris. Tetapi menyesuaikan dengan sosial, budaya, dan karakter negaranya hingga bernama Negara Bagian dari Inggris atau negara bagian dari Kerajaan Inggris yang terdiri dari parlemen-parlemen dari masing-masing negara bagian.

Inggris sebagai negara kolonialisme yang kuat memang memiliki kepentingan yang besar terhadap negara-negara koloninya. Termasuk pada Skotlandia, sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam melimpah terutama dalam hal Minyak bumi, membuat Inggris semakin berat melepaskan Skotlandia dari kesatuan Inggris.

Sedangkan, dari hasil referendum yang telah dilaksanakan di Skotlandia terkait keinginan yang di usung oleh kelompok nasionalis Skotlandia, jumlah warga yang tidak mendukung kemerdekaan lebih banyak dibandingkan dengan jumlah warga yang mendukung kemerdekaan. Sehingga kemenangan tipis suara masyarakat yang menolak melepaskan diri dari Britania Raya akhirnya menetapkan bahwa Skotlandia tetap menjadi bagian Britania Raya. Atas hasil referendum tersebut, Menteri Pertama Skotlandia, Alex Salmon mengundurkan diri dan menerima kekalahannya.

Tetapi diharapkan pemerintah Britania Raya akan tetap memenuhi janji

kepada masyarakat Skotlandia bahwa akan lebih memperhatikan rakyat Skotlandia dan memberikan pelimpahan wewenang lebih besar kepada Skotlandia dalam hal politik dan pemerintahan serta menjanjikan otonomi ekonomi yang lebih luas.

[Notes]

[1] *A Theory of Political Integration*. Illinois. (1987). The Dorsey Press

[2] Black, Andrew. "Scottish independence: Referendum to be held on 18 September, 2014". (21 March 2013). London: BBC News. Retrieved November 21, 2016.

[3] "Referendum Bill". *Official website, About > Programme for Government > 2009–10 > Summaries of Bills > Referendum Bill*. Scottish Government. 2 September 2009. Diarsipkan dari versi asli tanggal 10 September 2009. Diakses tanggal 22 November 2016.

[4] *National Planning Framework for Scotland*. Scottish Government publication, (web-page last updated 6 April 2006), which states "*Since the 1970s, the development of North Sea oil and gas fields has made an important contribution to the Scottish economy, and underpinned prosperity in the North-East.*". Retrieved 7 December 2016.

[5] *Scotland's Future: Draft Referendum (scotland) Bill Consultation Paper*. (25 February 2010). Retrieved November 12, 2016. from:
[http://www.scotland.gov.uk/PDF 1. Scottish Government](http://www.scotland.gov.uk/PDF/1_Scottish_Government)

[6] *Dukungan kemerdekaan Skotlandia mulai berkurang*. Retrieved November 12, 2016. from Monexnews:
<http://www.monexnews.com/world-economy/dukungan-kemerdekaan-skotlandia-mulai-berkurang.htm>

[7] *Skotlandia jajak pendapat Tracker*. (Mei 28, 2014). *BBC News*. Retrieved December 26, 2016.

[8] *Warga Skotlandia anggap Inggris ingkar janji*. CNNIndonesia. Retrieved November 20, 2016 from CNN Indonesia:
<http://www.cnnindonesia.com/internasional/20141016111329-134-6555/warga-skotlandia-anggap-inggris-ingkar-janji/>